

Dampak Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Anandi Dwilaksmi^{1*}, Alifia Agnes Nabilah¹, Estro Dariatno Sihaloho¹

Afiliasi Universitas Padjadjaran¹

Email anandi22001@mail.unpad.ac.id*

DOI <https://doi.org/10.23969/jrie.v5i1.147>

Sitasi Dwilaksmi, A., Nabilah, A. A., & Sihaloho, E. D. (2025). Dampak Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 5(1), 36–50. <https://doi.org/10.23969/jrie.v5i1.147>



Copyright (c) 2025 Jurnal Riset Ilmu Ekonomi

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the importance of the relationship between Indonesia's Human Development Index (HDI) and government spending on food assistance. This study uses the Panel Data Regression approach to aggregate cross-sectional data from 34 provinces throughout the years 2018–2022. The data utilized in this investigation came from the Ministry of Finance (KEMENKEU) and Statistics Indonesia (BPS) sources. This study found that food social assistance has a positive influence on HDI. School Expectancy, the School Operational Assistance (BOS) budget, and the Health Operational Assistance budget (BOK) also have a positive influence on HDI. Meanwhile, the poverty rate has a negative influence on HDI. As indicated by the rise in the HDI, the study's findings suggest that the government's implementation of Social Food Assistance spending has a beneficial effect on raising the standard of human development in Indonesia.

Keywords: Food Social Assistance, Human Development Index, Social Welfare

JEL Classification: O15, H51, H52, H53

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pentingnya hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dan pengeluaran pemerintah untuk bantuan sosial pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Regresi Data Panel

untuk menggabungkan data *cross-sectional* di 34 provinsi dengan periode waktu dari tahun 2018-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari data Kementerian Keuangan (KEMENKEU) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa bantuan sosial pangan memiliki pengaruh yang positif terhadap angka IPM. Variabel harapan lama sekolah, anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) memiliki pengaruh positif juga terhadap IPM. Sementara itu, tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif terhadap IPM. Sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan IPM, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengeluaran pemerintah untuk Bantuan Sosial Pangan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

Kata Kunci: Bantuan Sosial Pangan, Indeks Pembangunan Manusia, Kesejahteraan Sosial

JEL Classification: O15, H51, H52, H53

PENDAHULUAN

United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan konsep pembangunan manusia pada tahun 1990, yang sejak saat itu menjadi prioritas dalam agenda pembangunan oleh pemerintah di berbagai negara. Tujuan dari pembangunan manusia adalah untuk meningkatkan taraf hidup individu dan masyarakat secara menyeluruh dengan memperluas peluang mereka dalam memperoleh akses terhadap sumber daya serta memenuhi kebutuhan dasar secara layak (UNDP, 2015). Pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi faktor keberhasilan pembangunan suatu negara jika tidak disertai dengan upaya memperbaiki taraf hidup masyarakat (Todaro & Smith, 2011). Pembangunan harus merepresentasikan perubahan masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat dan keinginan masyarakat dalam rangka mencapai kondisi kehidupan yang layak dan lebih baik (Todaro & Smith, 2011).

Tujuan dari pembangunan manusia adalah meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan berbagai pilihan yang bisa diakses oleh individu. Menurut laporan United Nations Development Programme, pembangunan manusia meliputi beberapa aspek penting seperti kesehatan yang baik dan umur panjang, akses pendidikan, standar hidup yang memadai, kebebasan untuk politik, dan perlindungan hak asasi manusia, serta penghargaan terhadap martabat individu. Semua elemen ini merupakan komponen penting dalam meningkatkan taraf hidup manusia (UNDP, 2010).

Berdasarkan laporan UNDP tahun 1990, Konsep pembangunan manusia mencakup aspek produksi dan distribusi komoditas. Sehingga, pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan proses partisipatif melibatkan perluasan pilihan bagi masyarakat mengenai apa yang perlu

dimiliki dan apa yang harus dilakukan oleh setiap individu untuk mencapai ketiga komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UNDP, 2010). IPM merupakan konsep yang digunakan dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan manusia dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen, yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen daya beli (Fahrika et al., 2020). Pada intinya, yang memiliki peran utama dalam suatu kegiatan seperti menghimpun modal, memanfaatkan sumber daya alam, dan menjalankan pembangunan nasional adalah manusia. Sementara itu, sumber daya alam dan modal berbentuk fisik sifatnya pasif hanya bertindak sebagai faktor produksi (Mongan, 2019).

IPM digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia, mencakup aspek-aspek seperti umur panjang dan kesehatan, pendidikan, serta standar hidup yang memadai (UNDP, 2010). IPM dikenal luas sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. IPM memiliki empat tingkatan: skor di atas 80 – 100 menunjukkan IPM yang sangat tinggi, skor antara 70 – 80 menunjukkan IPM tinggi, skor antara 60 – 70 menunjukkan IPM sedang, dan skor di bawah 60 menunjukkan IPM rendah (Pradana, 2018). Di Indonesia, IPM dianggap sebagai data utama karena tidak hanya digunakan sebagai ukuran performa pemerintah, IPM juga menjadi acuan dalam menentukan besaran alokasi dana umum (Mongan, 2019). Pembangunan manusia dikatakan berhasil dilihat dari banyaknya permasalahan yang muncul di masyarakat dapat teratasi (Rahmawati & Nur Intan, 2020).

Indonesia menerapkan metode pengukuran pembangunan manusia yang digunakan oleh UNDP dengan menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara mandiri. Penghitungan IPM di Indonesia mencakup tiga dimensi utama, sama seperti yang digunakan oleh UNDP, yaitu: dimensi umur panjang dan kesehatan yang baik, dimensi tingkat pengetahuan, serta dimensi taraf hidup yang layak. Pertama, pada dimensi umur panjang dan kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) Indonesia tahun 2022 mencapai 71,85 tahun. Angka ini meningkat 0,28 tahun atau 0,39 persen dibanding tahun sebelumnya. Kedua, pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah di Indonesia tahun 2022 mencapai 13,10 tahun, menunjukkan potensi pendidikan hingga tahun pertama perguruan tinggi. Ketiga, pada dimensi taraf hidup layak, capaian tahun 2022 menjadi yang tertinggi, tumbuh 2,90 persen dan melampaui level sebelum pandemi (BPS, 2022). Berdasarkan isu-isu ini, Indonesia digolongkan sebagai negara dengan Pembangunan Manusia Tinggi atau *High Human Development* (UNDP, 2022). Solusi untuk isu kesehatan dan akses terhadap layanan dasar seperti sekolah, pemerintah harus berfokus terhadap porsi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan. Alokasi anggaran yang lebih besar untuk kesehatan dan pendidikan berpotensi meningkatkan tingkat pembangunan. Namun, efisiensi dan distribusi yang merata harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Pengeluaran pemerintah biasanya lebih efisien dan luas cakupannya di negara-negara dengan institusi dan tata kelola yang baik (Martins & Veiga, 2014). Sejalan dengan penelitian (Fidella, 2021), faktor-faktor yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM yaitu anggaran belanja

pendidikan dan kesehatan, infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta belanja ekonomi.

Menurut Damanik et al. (2022), pendidikan akan meningkatkan keterampilan seseorang, sementara kesehatan membuat seseorang lebih bugar dalam menjalankan aktivitasnya dan berpikir lebih jernih saat bekerja. Dengan akses yang mudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan dapat terpenuhi, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat. Terpenuhinya kebutuhan kesehatan juga menunjukkan tercapainya salah satu dimensi IPM, yaitu hidup sehat dan umur panjang (Damanik et al., 2022). Kemudian, semakin banyak masyarakat yang memiliki harapan lama sekolah minimal sesuai dengan kebijakan wajib belajar, maka akan semakin banyak masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan yang baik. Kemampuan ini nantinya akan mendorong kreativitas dan inovasi. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan juga menunjukkan tercapainya salah satu dimensi IPM, yaitu pengetahuan (Wafa et al., 2022).

Sementara itu, untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan kelaparan, pemerintah Indonesia menghadirkan program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT adalah program dengan kegiatan yang berfokus pada bantuan sosial berbasis keluarga untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan bahan pokok. BPNT merupakan bagian pada klaster pertama dari program pengentasan kemiskinan (Yunus, 2019). Program BPNT juga merupakan upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok, yang juga dikenal sebagai *purchasing power parity* (Mongan, 2019).

BPNT merupakan reformasi dari program Rastra dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan tujuan program. Karena pada pelaksanaan rastra, terdapat masalah pada indikator ketepatan sasaran dimana penerima yang seharusnya masyarakat kurang mampu ternyata adalah masyarakat yang mampu. Selain indikator sasaran yang tidak tepat, indikator ketepatan jumlah juga tidak sesuai (Fadhli & Nazila, 2023). Dimulai pada tahun 2017, Program BPNT didistribusikan ke 44 kota yang memiliki fasilitas dan akses yang memadai. Bantuan ini secara bertahap diperlebar ke seluruh kota dan kabupaten di Indonesia yang memiliki kesiapan infrastruktur penyaluran non tunai. Namun, untuk daerah yang belum memungkinkan penyaluran secara non tunai, Keluarga Penerima Manfaat tidak perlu memiliki *E-Voucher* karena bantuan akan tetap diberikan melalui sistem Rastra (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 2019).

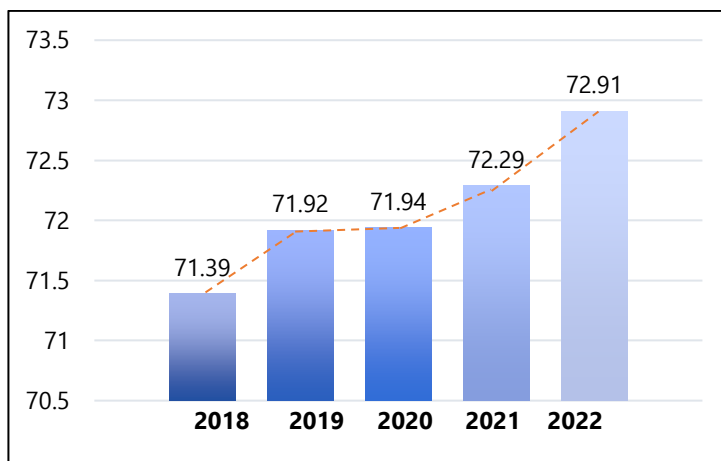
BPNT diberikan setiap bulannya dalam bentuk non tunai melalui akun elektronik kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Akun elektronik ini hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pokok di mitra bank penyalur seperti *E-Warong* dan Rumah Pangan Kita. Dengan menyediakan bahan pokok, meningkatkan keseimbangan nutrisi, memperbaiki ketepatan dalam menjangkau sasaran dan waktu penyaluran bantuan, memberikan KPM lebih banyak opsi dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, diharapkan bantuan ini

akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan KPM (Yunus, 2019). Berdasarkan Panduan Umum Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2019, besaran *E-Voucher* yang diterima oleh KPM adalah sebesar Rp110.000 setiap bulannya. Jumlah dana tersebut hanya untuk ditukar dengan komoditas utama seperti beras dan telur sesuai kebutuhan, artinya dana tersebut tidak dapat dicairkan menjadi uang tunai. Beras dan telur menjadi komoditas utama dalam Program BPNT dengan tujuan tercukupinya gizi KPM (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 2019). Penyaluran BPNT melalui sistem *E-Voucher* memiliki tujuan untuk mendorong produktivitas masyarakat melalui waktu penukaran dana yang fleksibel dan terdapat peluang menabung bagi masyarakat. Pada akhirnya, dengan memberikan akses yang lebih luas pada layanan bantuan sosial, penyaluran BPNT akan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kemampuan finansial penerima manfaat (Kementerian Lintas Sektor, 2017).

Sejalan dengan penelitian (Nawawi et al., 2021), program perlindungan dan bantuan sosial dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat secara langsung terkhusus untuk masyarakat tidak mampu sehingga hadirnya program tersebut akan meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat. Kemudian dalam penelitian (Dj Julius et al., 2022), penduduk dengan kondisi sosial ekonominya 25% terbawah dari struktur pendapatan Indonesia memiliki hak untuk menerima bantuan sosial pangan. Program tersebut diharapkan memiliki dampak pada daya beli serta indeks pembangunan manusia. Penelitian oleh (Dj Julius et al., 2022) juga memberikan hasil bahwa beberapa program yang salah satunya yaitu program bantuan pangan memiliki dampak yang positif dan signifikan untuk jangka panjang.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, IPM Indonesia telah mencapai 72,91, mengalami peningkatan sebesar 0,86 persen. Pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya mencatatkan kenaikan 0,49 persen pada tahun 2021 dan 0,03 persen pada tahun 2020. Kenaikan IPM pada tahun 2022 hampir sebanding dengan rata-rata kenaikan IPM per tahun selama periode 2010-2019, sebelum adanya pandemi COVID-19.

Gambar 1 menunjukkan tren peningkatan nilai dari tahun 2018 hingga 2022. Dimulai dengan nilai 71,39 pada tahun 2018, terdapat peningkatan bertahap setiap tahun dengan nilai 71,92 pada tahun 2019 dan 71,94 pada tahun 2020. Kenaikan lebih signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 72,29 dan puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai 72,91. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun berturut-turut.



Gambar 1. Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023, Diolah.

Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berkontribusi terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia (Ramadhan & Bahri, 2018). Selain itu, sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Laloan et al., 2020) faktor Bantuan Sosial Pangan dari pemerintah dalam hal ini Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki hubungan positif dan memberikan dampak terhadap IPM. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis signifikansi bagaimana dampak pengeluaran pemerintah untuk bantuan sosial pangan terhadap IPM Indonesia. Di samping itu, pada penelitian lainnya juga menyatakan bahwa pengaruh variabel isi kebijakan PKH dan lingkungan implementasi kebijakan PKH secara bersama-sama cukup kuat dalam menjelaskan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya turut memengaruhi capaian IPM (Arum & Sugiyanto, 2023).

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari BPS dan Kementerian Keuangan. Informasi tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, beserta sumbernya, dilampirkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Variabel

Nama Variabel	Keterangan	Satuan	Sumber
IPM	Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan provinsi pada tahun 2018-2022.	Persen	Badan Pusat Statistik Indonesia
Inbansos_pangan	Logaritma natural dari realisasi belanja bantuan sosial pangan (Bansos Pangan) menurut provinsi tahun 2018-2022.	Rupiah	Badan Pusat Statistik Indonesia
lama_sekolah	Angka harapan lama sekolah menurut provinsi tahun 2018-2022	Tahun	Badan Pusat Statistik Indonesia
pend_miskin	Persentase penduduk miskin menurut provinsi tahun 2018-2022	Persen	Badan Pusat Statistik Indonesia
Indana_bos	Logaritma natural dari realisasi dana bantuan operasional sekolah menurut provinsi tahun 2018-2022.	Rupiah	Kementerian Keuangan
Indana_kesehatan	Logaritma natural dari realisasi dana bantuan operasional kesehatan menurut provinsi tahun 2018-2022.	Rupiah	Kementerian Keuangan

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, penelitian ini menggunakan pendekatan data panel, yaitu dengan kombinasi data *Time Series* dari tahun 2018 hingga 2022 dan *Cross-Section* yang mencakup 34 Provinsi di Indonesia. Data Panel menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross-section* sehingga memberikan variabilitas data yang lebih tinggi, mengurangi masalah multikolinearitas, menambah derajat kebebasan, serta meningkatkan efisiensi estimasi. Keunggulan ini sangat relevan dalam studi pembangunan manusia, di mana dinamika sosial ekonomi yang terjadi antar waktu dan antar wilayah perlu diperhatikan secara simultan (Gujarati & Porter, 2012). Selain itu, variabel penyusun IPM cenderung bersifat tidak menentu karena bervariasi antar wilayah dan waktu yang membuatnya cukup krusial untuk diteliti (Hidayat et al., 2018). Sehingga metode data panel digunakan untuk menangkap dinamika tersebut.

Model ekonometrika yang digunakan sebagai berikut :

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln bansos_pangan_{it} + \beta_2 lama_sekolah_{it} + \beta_3 pend_miskin_{it} + \beta_4 \ln dana_bos_{it} + \beta_5 \ln dana_kesehatan_{it} + u_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- Inbansos_pangan = Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pangan

lama_sekolah	=	Harapan Lama Sekolah
pend_miskin	=	Persentase Penduduk Miskin
Indana_bos	=	Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah
Indana_kesehatan	=	Realisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan
β_0	=	Konstanta
u	=	Error Term
ln	=	Logaritma Natural
i	=	Provinsi
t	=	Tahun

HASIL

Data yang digunakan mencakup 34 provinsi di Indonesia dengan periode tahun 2018 hingga 2022. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022, provinsi DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi yaitu sebesar 81.65 dan terendah berada di provinsi Papua pada tahun 2018 sebesar 60.06. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pangan (BANSOS PANGAN) tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sebesar 10,300.2 triliun rupiah dan terendah berada di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebesar 5.73 miliar rupiah. Secara rata-rata, realisasi belanja bantuan sosial pangan (BANSOS PANGAN) di 34 Provinsi adalah sekitar 728.23 miliar rupiah. Dalam hal harapan lama sekolah, tertinggi berada di provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar 15.65 tahun dan terendah berada di provinsi Papua pada tahun 2018 sebesar 10.83 tahun. Disisi lain, persentase penduduk miskin tiap provinsi memiliki rata-rata sebesar 10.5317% terbilang cukup tinggi, dimana persentase penduduk miskin tertinggi tercatat di Provinsi Papua pada tahun 2018, mencapai 27,74%, sedangkan persentase terendah terjadi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019, hanya mencapai 3,47%.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. dev	Min	Max
provinsi	0				
id	170	17.5	9.839691	1	34
tahun	170	2020	1.418391	2018	2022
ipm	170	71.16741	3.916709	60.06	81.65
keluarga_bansos	170	1281347	3525463	21.013	2.62e+07
bansos_pangan	170	7.28e+11	1.62e+12	5.73e+09	1.03e+13
lama_sekolah	170	13.14006	.7477386	10.83	15.65
pend_miskin	170	10.53171	5.406656	3.47	27.74
dana_bos	170	1.46e+12	1.84e+12	1.29e+11	9.32e+12
dana_kesehatan	170	2.91e+11	2.40e+11	9.78e+09	1.49e+12

Sumber : BPS (2023), Kementerian Keuangan (2023), Diolah.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 1 yang bersumber dari data BPS dan Kementerian Keuangan, dapat terlihat bahwa terdapat variasi yang cukup besar pada beberapa variabel, seperti dana bantuan sosial pangan, Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional

Kesehatan, yang ditunjukkan oleh nilai standar deviasi yang tinggi. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar provinsi dan tahun dalam periode pengamatan. Sementara itu, rata-rata IPM berada pada angka 71,17, yang menunjukkan bahwa secara umum kualitas pembangunan manusia di Indonesia berada pada kategori sedang, meskipun terdapat perbedaan signifikan antar provinsi, dengan nilai minimum 60,06 dan maksimum 81,65. Rata-rata lama sekolah juga menunjukkan angka yang relatif stabil, dengan standar deviasi rendah, mencerminkan keseragaman tingkat pendidikan dasar di sebagian besar wilayah. Temuan ini memberikan gambaran awal mengenai perbedaan capaian dan alokasi anggaran antar wilayah yang dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia.

Untuk menerapkan metode regresi linier berganda pada data yang terdapat dalam Tabel 1, langkah awal yang penting adalah memilih model estimasi yang paling sesuai. Terdapat tiga bentuk model regresi data panel yang umum digunakan untuk mengkaji hubungan antara variabel dependen dan variabel-variabel independennya, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model terbaik di antara ketiganya umumnya dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman (Gujarati & Porter, 2012).

Tabel 3. Uji Pemilihan Model

Jenis Uji	Nilai Statistik	P-value	Model Terpilih
Uji Chow	188.60	0.0000	Fixed Effect Model (FEM)
Uji Hausman	75.39	0.0000	Fixed Effect Model (FEM)

Untuk menentukan model regresi terbaik dalam analisis data panel, dilakukan uji Chow dan uji Hausman. Berdasarkan uji Chow yang telah dilakukan untuk penelitian ini, didapatkan nilai F sebesar 188.60 dengan probabilitas (*p-value*) 0.0000, yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Dengan demikian, CEM ditolak. Selanjutnya, uji Hausman yang dilakukan untuk memilih antara FEM dan REM menunjukkan nilai *chi-square* (χ^2) sebesar 75.39 dengan probabilitas (*p-value*) 0.0000. Karena nilai p lebih kecil dari 0.05, maka FEM lebih tepat dibandingkan REM. Selain uji pemilihan model, pengujian asumsi klasik juga perlu dilakukan.

Tabel 4. Hasil Regresi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) periode tahun 2018-2022

ipm	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	95% Conf	Interval	Sig
Inbansos_pangan	.186	.033	5.68	.000	.122	.251	***
lama_sekolah	3.04	.345	8.82	.000	2.358	3.722	***
pend_miskin	-.112	.044	-2.54	.012	-.199	-.025	**
Indana_bos	.774	.311	2.49	.014	.16	1.389	**
Indana_kesehatan	.299	.099	3.03	.003	.104	.495	***
Constant	-1.616	6.943	-0.23	.816	-15.351	12.119	

ipm	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	95% Conf Interval	Sig
Mean dependent var	71.167		SD dependent var		3.917	
R-squared	0.747		Number of obs		170	
F-test	77.277		Prob > F		0.000	
Akaike crit. (AIC)	42.703		Bayesian crit. (BIC)		61.517	

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Sumber: Hasil Regresi

Dari tabel 4 hasil regresi, diperoleh nilai R-squared sebesar 0.747, yang mengindikasikan bahwa sekitar 74,7% variasi dalam IPM dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu bantuan sosial pangan, harapan lama sekolah, tingkat kemiskinan, realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan. Sementara itu, sisanya sebesar 25,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

Berdasarkan hasil regresi dengan pendekatan fixed effect model, ditemukan bahwa Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pangan (BSP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi BSP oleh pemerintah mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses pangan yang lebih baik, yang pada akhirnya memperkuat dimensi kesehatan dan kelayakan hidup dalam IPM. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan adanya hubungan positif antara belanja sosial pangan dan peningkatan IPM (Primananda et al., 2023; Sasana, 2012). Selain itu, variabel harapan lama sekolah juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi ekspektasi masyarakat terhadap lamanya pendidikan, maka semakin meningkat pula kualitas pembangunan manusia. Hasil ini memperkuat temuan-temuan dari studi sebelumnya (Manurung & Hutabarat, 2021; Mahya & Widowati, 2021; Meilinna et al., 2024) yang mengonfirmasi kontribusi signifikan sektor pendidikan dalam mendorong IPM.

Di sisi lain, persentase penduduk miskin menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, menandakan bahwa tingginya tingkat kemiskinan menjadi penghambat dalam peningkatan pembangunan manusia. Hasil ini konsisten dengan temuan sebelumnya (Saputro, 2022; Syofya, 2018; Priambodo, 2020) yang menunjukkan bahwa kemiskinan berkorelasi negatif dengan kualitas hidup. Selanjutnya, realisasi dana BOS serta realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan secara simultan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini mengimplikasikan bahwa intervensi pemerintah dalam pembiayaan operasional pendidikan dan kesehatan terbukti efektif dalam memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia. Penemuan ini diperkuat oleh berbagai studi sebelumnya yang menunjukkan kontribusi realisasi dana BOS (Edierespati & Damanhuri, 2012; Andiny & Sari, 2018) dan realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (Mongan, 2019; Palenewen et al., 2018) terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, hasil temuan ini

mendukung hipotesis bahwa belanja pemerintah, khususnya dalam bentuk bantuan sosial pangan, pendidikan, dan kesehatan, berperan penting dalam peningkatan IPM.

PEMBAHASAN

Hasil regresi menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) pada Tabel 4 menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Primananda et al., 2023) faktor Bantuan Sosial Pangan memiliki hubungan positif terhadap IPM. Penelitian lain menunjukkan bahwa belanja pemerintah khususnya bantuan sosial pangan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Sasana, 2012).

Selanjutnya, harapan lama sekolah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Pengaruh positif ini memungkinkan semakin tinggi harapan lama sekolah, semakin tinggi juga nilai IPM, menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Manurung & Hutabarat, 2021) dimana faktor harapan lama sekolah mempunyai hubungan positif dan memiliki kontribusi terhadap IPM. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Mahya & Widowati, 2021) bahwasannya harapan lama sekolah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yang berarti semakin tinggi harapan lama sekolah, semakin tinggi pula nilai IPM. Sejalan dengan itu, penelitian (Meilinna et al., 2024) juga menunjukkan bahwa harapan lama sekolah terdapat hubungan positif yang signifikan terhadap IPM.

Penduduk miskin memiliki pengaruh yang negatif terhadap IPM, yang berarti adanya korelasi antara tingginya tingkat kemiskinan dengan rendahnya IPM. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Chalid & Yusuf, 2014) faktor penduduk miskin memiliki hubungan negatif terhadap IPM. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Syofya, 2018) bahwasannya kemiskinan juga memiliki hubungan negatif dengan IPM. Didapatkan juga penelitian (Priambodo, 2020) yang mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa kemiskinan berdampak negatif terhadap IPM.

Realisasi Dana BOS berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Edierespatri & Damanhuri, 2012) faktor Realisasi Dana BOS memiliki hubungan positif dan nyata terhadap IPM. Penelitian lainnya oleh (Andiny & Sari, 2018) bahwasannya faktor Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah juga secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM.

Realisasi Dana BOK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Pengaruh positif ini menunjukkan dana yang digunakan untuk operasional kesehatan secara efektif membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Mongan, 2019) faktor Realisasi Dana BOK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Palenewen et al., 2018) bahwasannya Realisasi Dana BOK juga memberikan dampak positif dan signifikan terhadap IPM.

KESIMPULAN

Standar hidup yang layak menjadi salah satu komponen dari penilaian IPM. Standar hidup yang layak dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok. Program Bantuan Sosial Pangan menunjang masyarakat dalam mengakses kebutuhan pokok yang berpotensi meningkatkan standar hidup yang layak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja BPNT memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini menunjukkan bahwa kehadiran BPNT memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, terhadap kebutuhan pokok, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan standar hidup dan kesejahteraan. Selain variabel BPNT, faktor-faktor sosial lain seperti harapan lama sekolah, realisasi dana BOS, dan realisasi dana BOK juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Di sisi lain, variabel persentase penduduk miskin menunjukkan pengaruh negatif terhadap IPM. Hubungan negatif antara jumlah penduduk miskin dan IPM menandakan bahwa tingginya tingkat kemiskinan berpengaruh pada rendahnya IPM.

Berdasarkan temuan ini, pemerintah diharapkan untuk terus melanjutkan dan memperkuat program BPNT, baik dari segi kualitas distribusi, ketepatan sasaran, maupun efektivitas pemanfaatannya. Selain itu, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan tetap perlu menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan IPM secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga diharapkan mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada bantuan langsung, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat miskin agar mereka bisa meningkatkan kualitas hidup secara mandiri dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data yang lebih menyeluruh dan beragam, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya berfokus pada bantuan operasional, tetapi juga diharapkan bisa melihat secara keseluruhan dana yang digunakan pemerintah di kedua bidang tersebut. Selain itu, pendekatan yang lebih mendalam seperti wawancara langsung dengan penerima manfaat dapat menjadi pilihan agar hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang dialami masyarakat.

REFERENSI

- Andiny, P., & Sari, M. G. P. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(2), 1–10.
- Arum, D. S., & Sugiyanto, E. (2023). PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BAKTIJAYA, KOTA DEPOK. In *Jurnal Sosial dan Humaniora* (Vol. 8, Issue 2).

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks pembangunan manusia 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, TINGKAT PENGANGGURAN, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI RIAU. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12.
- Damanik, D., Panjaitan, P. D., Tumanggor, B., & Purba, F. (2022). Investigating the Effect of Government Spending on the Human Development Index in Simalungun Regency, Indonesia. *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities*, 1(4), 217–223. <https://doi.org/10.56225/ijassh.v1i4.99>
- Djulius, H., Lixian, X., Lestari, A. N., & Eryanto, S. F. (2022). The Impact of a Poor Family Assistance Program on Human Development in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 11(4), 1-12.
- Edierespati, D. L., & Damanhuri, D. S. (2012). Dampak Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap pembangunan manusia dan efektivitas pelaksanaan BOS di Kota dan Kabupaten Bogor. *Scientific Repository IPB University*.
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh Implementasi Bantuan Sosial Bpnt Dan Pkh Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 196–202. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4654>
- Fahrika, A. I., Salam, H., & Buhasyim, M. A. (2020). Effect of Human Development Index (HDI), Unemployment, and Investment Realization toward Poverty in South Sulawesi-Indonesia. *The International Journal of Social Sciences World*, 2(2), 110–116. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4080749>
- Fidella, R. (2021). The Factors Affecting HDI Indonesia. *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology*, 160–167. <https://doi.org/10.32628/ijrsrset218629>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). Dasar-Dasar Ekonometrika (Vol. 2). *Salemba Empat*.
- Hidayat, M. J., Hadi, A. F., & Anggraeni, D. (2018). Analisis regresi data panel terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Timur tahun 2006-2015. *Majalah Ilmiah Matematika dan Statistika*, 18(2), 69-80.
- Kementerian Lintas Sektor. (2017). *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*. 4.
- Laloan, I. A., Kairupan, S. B., & Langkai, J. (2020). Evaluasi Proses Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Tomohon Selatan. *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRASI)*, 1-7.
- Lubis, I. H. (2015). *Regional Government Budgets and Human Development Outcomes Across Indonesia's Provinces (Study Case of Provinces in Indonesia)*.
- Mahya, J. A., & Widowati. (2021). PENGARUH ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, DAN PENGELUARAN PER KAPITA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. In *Jurnal Pendidikan dan Riset Matematika* (Vol. 3, Issue 2). <http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/prismatika>

- Manurung, E. N., & Hutabarat, F. (2021). Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(2), 121–129. <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i2.1718>
- Martins, S., & Veiga, F. J. (2014). Government size, composition of public expenditure, and economic development. *International Tax and Public Finance*, 21(4), 578–597. <https://doi.org/10.1007/s10797-014-9313-4>
- Meilinna, T. Z., Alfunnuria, V. S., Safira, Y. E., & Kholid, M. K. A. (2024). Pengaruh Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita terhadap IPM. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, 3(1), 12–29. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v2i3.1613>
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 4 (2), 163-176.
- Nawawi, A., Kirana Jaya, W., Sumarto, M., & Pangaribowo, E. H. (2021). The Impact of Fiscal Policy on Welfare Improvement in Indonesia: Study of Impact of Premium Assistance Beneficiaries on The National Health Insurance, Physical Special Allocation Fund for Health Sector, Education Sector, and Village Funds to Human Development Index. In *Populasi* (Vol. 29).
- Palenewen, T. O. M., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2018). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP IPM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMISKINAN DI SULAWESI UTARA. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 1–10.
- Pradana, M. (2018). *ALOKASI BELANJA PEMERINTAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA*.
- Priambodo, A. (2020). *THE IMPACT OF UNEMPLOYMENT AND POVERTY ON ECONOMIC GROWTH AND THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI)*. <https://ejournal.unperba.ac.id/index.php/pijeb>
- Primananda, A., Yeniwati, & Artha, D. P. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan (JKEP)*, 5, 11–20.
- Rahmawati, F., & Nur Intan, M. (2020). Government Spending, Gross Domestic Product, Human Development Index (Evidence from East Java Province). *KnE Social Sciences*, 2020, 774–786. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6641>
- Ramadhan, T., & Bahri, S. (2018). *EFEKTIVITAS PROGRAM BPNT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU*. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/720473>.
- Saputro, M. H., (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Model Regresi Linear. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2).
- Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (Studi Kasus di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Media Ekonomi dan Manajemen Vol 25. No 1 Januari 2012.*

- Setiawan, I. N., Kristiani, S. N., Nurarifin, Delyana, S., Setyawati, N., & Arsyi, F. A. (2022). *INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Syofya, H. (2018). PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 15*(2), 1–9.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (2019). Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019*, 1–174.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan ekonomi (Edisi Kesebelas ed.). Erlangga.
- UNDP (United Nations Development Programme). (2014). Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. New York.
- UNDP (United Nations Development Programme). (2022). Human Development Report 2022. New York
- UNDP. (2010). Human Development Report 2010 The Real Wealth of Nations : Pathways to Human Development. In *Human Development* (Vol. 21). http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete_reprint.pdf
- United Nations Development Programme. (2015). Human development report 2015. New York: Oxford University Press.
- Wafa, N. R.T., Mukhtar, S., & Kuncara Wiralaga, H. (2022). the Effect of Local Government Expenditures in the Education Sector and Gdp Regional on Hdi in Indonesia in 2015-2018. *International Journal of Current Economics & Business Ventures, 2*(1), 19–32. <https://scholarsnetwork.org/journal/index.php/ijeb>
- Yunus, E. Y. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO. *REFORMASI, 9*(2), 138. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1454>